

Konstruksi Tanggung Jawab Negara dalam Pemenuhan Hak Veteran RI: Analisis Framing pada Pemberitaan Media di Sumatera Utara

Dheny Sugara¹

¹ PD Pemuda Panca Marga Sumatera Utara, Indonesia

Korespondensi: dhenysugara26@gmail.com

Informasi Artikel

Riwayat artikel:

Received Aug 11th, 2026

Revised Sept 10th, 2026

Accepted Sept 12th, 2026

Keyword:

Analisis Framing; Media online;
Penghormatan kepada Veteran;
Veteran.

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis konstruksi media mengenai tanggung jawab negara dalam pemenuhan hak Veteran Republik Indonesia di Sumatera Utara. Penelitian menggunakan analisis framing Robert N. Entman terhadap tiga berita daring dari Posmetro Medan, Tobasatu, dan Waspada yang terbit pada September 2026. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiga media membingkai persoalan dengan penekanan berbeda. Posmetro Medan menyoroti belum terpenuhinya hak veteran, Tobasatu menekankan hambatan birokrasi dan pendataan, sedangkan Waspada menekankan sinergi kelembagaan, pelayanan, dan tindak lanjut konkret. Secara keseluruhan, media mengonstruksi tanggung jawab negara melalui pendataan, administrasi, koordinasi, pelayanan, dan pemenuhan hak. Temuan menunjukkan bahwa penghormatan terhadap veteran mengalami pergeseran dari simbolik menuju substantif, dengan menempatkan veteran sebagai subjek hak yang berhak memperoleh pelayanan negara secara adil. Penelitian ini menegaskan pentingnya sinkronisasi data, penyederhanaan administrasi, penguatan koordinasi lintas lembaga, serta tindak lanjut program yang terukur untuk memastikan pemenuhan hak veteran secara efektif.



© 2026 The Authors. Published by Punggawa Legacy Center. This is an open access article under the CC BY license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)

PENDAHULUAN

Veteran Republik Indonesia memiliki posisi khusus dalam kehidupan berbangsa dan bernegara (Baka et al., 2026; Putera et al., 2026; Saepudin, 2026; Satyadharma & Erfain, 2022). Status tersebut berkaitan dengan pengalaman perjuangan dan pengabdian dalam mempertahankan kemerdekaan serta kedaulatan Indonesia. Oleh karena itu, keberadaan veteran tidak hanya memiliki dimensi historis, tetapi juga dimensi sosial, hukum, dan kesejahteraan (Barmuddin et al., 2025; Barmuddin & Safitri, 2026; Basuki et al., 2025; Kerihi, 2026).

Penghormatan terhadap veteran pada dasarnya tidak cukup diwujudkan melalui seremoni atau peringatan hari tertentu (Barmuddin et al., 2026; Pirsouw et al., 2025; Silondae et al., 2026). **Penghormatan pada veteran perlu diwujudkan melalui pemenuhan hak yang telah diberikan oleh negara** (Nugroho et al., 2026; Sukawati & Silondae, 2026). Dengan demikian, hubungan antara negara dan veteran tidak berhenti pada pengakuan simbolik, tetapi berlanjut pada tanggung jawab administratif dan pelayanan yang memungkinkan veteran memperoleh haknya secara nyata (Savitri, 2024).

Persoalan tersebut menjadi perhatian di Sumatera Utara setelah dilaksanakannya Rapat Koordinasi antarkementerian/lembaga dan pemangku kepentingan mengenai pemenuhan hak-hak tertentu bagi Veteran Republik Indonesia di Kota Medan pada 10 September 2026. Waspada (waspada.id, 2026)

memberitakan bahwa rapat tersebut dimaksudkan sebagai wadah memperkuat sinergi dalam memberikan pelayanan, perlindungan, dan pemenuhan hak veteran sebagai bentuk penghargaan negara terhadap para pejuang bangsa.

Posmetro Medan (Silalahi, 2026) memberitakan bahwa Sumatera Utara memiliki sekitar 2.240 veteran dan masih terdapat calon veteran yang belum menerima tunjangan, dana kehormatan, maupun hak tertentu. Pemberitaan tersebut juga menempatkan rapat koordinasi sebagai sarana untuk menyelaraskan tugas, kewenangan, dan peran berbagai lembaga dalam memastikan pemenuhan hak veteran secara efektif dan tepat sasaran.

Tobasatu (tobasatu.com, 2026) menggunakan sudut pandang yang lebih administratif. Media tersebut menggambarkan adanya kesenjangan antara jaminan negara terhadap kehidupan veteran dan kenyataan di lapangan berupa persoalan birokrasi serta pendataan. Artikel tersebut menyebut bahwa persoalan pendataan dapat menyebabkan calon veteran belum memperoleh tunjangan dan hak tertentu.

Ketiga pemberitaan tersebut menarik untuk dianalisis karena mengangkat peristiwa yang relatif sama, tetapi menghadirkan penekanan yang berbeda. Posmetro Medan lebih menonjolkan persoalan belum terpenuhinya hak; Tobasatu menekankan persoalan birokrasi dan data; sedangkan Waspada menekankan sinergi kelembagaan dan tindak lanjut konkret. Perbedaan penekanan tersebut menunjukkan adanya proses konstruksi realitas oleh media.

Media massa tidak sekadar memindahkan fakta dari peristiwa kepada pembaca (Manalu, 2023; Peranginangin et al., 2025). Media melakukan seleksi terhadap informasi, menentukan aspek yang ditonjolkan, memilih narasumber, menyusun judul, dan memberikan konteks tertentu (Haerul et al., 2024). Karena itu, suatu peristiwa yang sama dapat menghasilkan konstruksi makna yang berbeda ketika diberitakan oleh media yang berbeda (Fariansyah et al., 2020; Rifa'i, 2024).

Konsep tersebut dapat dianalisis menggunakan teori framing Robert N. Entman. Entman memandang framing melalui empat fungsi utama, yaitu define problems, diagnose causes, make moral judgment, dan treatment recommendation. Keempat unsur tersebut memungkinkan peneliti mengidentifikasi bagaimana media mendefinisikan suatu masalah, menentukan penyebab, memberikan penilaian moral, dan menawarkan penyelesaian.

Penelitian mengenai framing media terhadap veteran masih relatif terbatas dibandingkan penelitian framing mengenai isu politik, konflik, kebijakan publik, dan persoalan sosial lainnya. Kajian veteran di media umumnya lebih banyak menempatkan veteran dalam konteks perjuangan, nasionalisme, penghargaan, dan peringatan sejarah. Sementara itu, penelitian yang secara khusus melihat bagaimana media membangun konstruksi tanggung jawab negara dalam pemenuhan hak veteran masih perlu dikembangkan. Kebaruan penelitian ini terletak pada upaya menghubungkan analisis framing dengan persoalan hak veteran dan akuntabilitas negara. Veteran tidak ditempatkan semata-mata sebagai simbol sejarah, tetapi sebagai warga negara yang memiliki hak dan berhadapan dengan sistem pelayanan publik.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana media online mengonstruksi tanggung jawab negara dalam pemenuhan hak Veteran Republik Indonesia di Sumatera Utara melalui pemberitaan Posmetro Medan, Tobasatu, dan Waspada.

METODE PENELITIAN

Realitas media merupakan hasil seleksi, interpretasi, dan penyusunan terhadap suatu peristiwa berdasarkan nilai berita (Hadiwijaya, 2023; Tahitu et al., 2021). Metode penelitian yang digunakan adalah analisis framing Robert N. Entman. Objek penelitian berupa tiga berita daring yang membahas pemenuhan hak veteran di Sumatera Utara. Framing menurut Entman merupakan proses memilih aspek tertentu dari realitas dan membuatnya lebih menonjol dalam suatu teks komunikasi (Hidayat & Prasetyo, 2023; Mursalim & Sulisty, 2026). Empat elemen framing Entman digunakan sebagai berikut.

Tabel 1 Unit Analisis Framing Entman

Elemen	Pertanyaan Analisis
Pendefinisian masalah	Apa yang dianggap sebagai persoalan utama?
Diagnosis penyebab	Siapa atau apa yang dianggap menyebabkan masalah?
Penilaian moral	Nilai atau penilaian apa yang diberikan terhadap masalah dan aktor?
Rekomendasi penyelesaian	Solusi apa yang ditawarkan atau ditekankan?

Keempat unsur tersebut digunakan untuk membandingkan konstruksi Posmetro Medan, Tobasatu, dan Waspada.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari pemberitaan terkait Veteran pada Media Online di Provinsi Sumatera Utara akan diuraikan dalam Tabel 2 berikut

Tabel 2. Data Penelitian

No.	Media	Tanggal	Fokus Pemberitaan
1	Posmetro Medan	11 September 2026	2.240 veteran dan calon veteran yang belum memperoleh hak
2	Tobasatu	10 September 2026	Sinkronisasi data, birokrasi, dan reformasi administrasi
3	Waspada	10 September 2026	Rakor, sinergi antarlembaga, pelayanan, dan pemenuhan hak

Sumber : Data Sekunder (2026)

Framing Posmetro Medan: Hak Veteran yang Belum Terpenuhi

Judul Posmetro Medan secara langsung menonjolkan angka **2.240 veteran** dan persoalan bahwa terdapat calon veteran yang belum menerima tunjangan, dana kehormatan, atau hak lainnya.

Pendefinisian Masalah

Masalah utama didefinisikan sebagai **belum terpenuhinya hak sebagian veteran atau calon veteran** secara optimal akibat keterbatasan akses, informasi, administrasi, dan koordinasi antarinstansi dalam pelayanan publik.

Diagnosis Penyebab

Penyebab dikaitkan dengan tata kelola administrasi dan pendaftaran calon veteran. Posmetro Medan menyebut adanya perubahan tata kelola administrasi keveteranan yang melibatkan satuan komando kewilayahan dalam pembinaan administrasi dan pendaftaran calon veteran. Dengan demikian, persoalan veteran dikonstruksi bukan hanya sebagai persoalan kesejahteraan, tetapi juga persoalan administrasi pemerintahan.

Penilaian Moral

Penilaian moral dibangun melalui pernyataan bahwa veteran merupakan **pejuang kebangsaan** dan bahwa bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai para pejuangnya sebagai bentuk penghormatan terhadap sejarah, pengorbanan, jasa, dan nilai perjuangan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Rekomendasi Penyelesaian

Solusi yang ditonjolkan adalah sinergi antarpemangku kepentingan. Posmetro Medan menyebut keterlibatan pemerintah daerah, TNI-Polri, Kodam, Polda, Lanud, Kodaeral, Taspen, dan BPJS.

Dengan demikian, Posmetro Medan membangun frame:

masalah hak → persoalan administrasi → kewajiban menghormati veteran → sinergi kelembagaan.

Framing Tobasatu: Birokrasi dan Pendataan sebagai Hambatan

Pendefinisian Masalah

Masalah didefinisikan sebagai **ketidakefektifan sistem administrasi dalam menghubungkan veteran dengan layanan, informasi, pemenuhan hak, serta koordinasi antarinstansi secara terpadu, cepat, transparan, dan berkelanjutan. dengan haknya.** Artinya, fokus pemberitaan bergeser dari sekadar “veteran belum menerima hak” menjadi “mengapa sistem administrasi belum mampu memastikan hak tersebut diterima”.

Diagnosis Penyebab

Penyebab utama adalah birokrasi dan persoalan pendataan. Tobasatu menyebut masih terdapat calon veteran di Sumatera Utara yang luput dari pendataan sehingga belum memperoleh tunjangan kehormatan dan hak tertentu.

Penilaian Moral

Penilaian moral dibangun melalui gagasan bahwa negara tidak boleh membiarkan orang yang telah mengorbankan masa mudanya bagi kedaulatan bangsa mengalami keterlambatan dalam memperoleh hak. Dengan demikian, masalah administrasi memperoleh dimensi moral: **birokrasi yang tidak efektif dapat menghasilkan ketidakadilan bagi veteran.**

Rekomendasi Penyelesaian

Tobasatu menonjolkan reformasi struktur pelayanan dan pendekatan pelayanan yang lebih dekat dengan veteran.

Frame Tobasatu dapat dirumuskan sebagai:

birokrasi dan data → keterlambatan hak → negara tidak boleh abai → reformasi administrasi dan pelayanan dekat veteran.

Framing Waspada: Sinergi Negara dan Tindak Lanjut Konkret

Pendefinisian Masalah

Masalah didefinisikan sebagai belum optimalnya pelayanan dan masih adanya calon veteran yang belum terdaftar. Waspada menyebut bahwa masih banyak calon veteran di Sumatera Utara yang belum mendaftar dan belum mendapatkan tunjangan, dana kehormatan, serta hak tertentu.

Diagnosis Penyebab

Penyebab diletakkan pada persoalan pendaftaran dan administrasi. Namun, berbeda dari Tobasatu, Waspada tidak terlalu menonjolkan kesalahan lembaga tertentu. Fokusnya adalah kebutuhan koordinasi.

Penilaian Moral

Waspada menempatkan veteran sebagai pihak yang memiliki jasa besar bagi bangsa dan negara. Bahkan kesejahteraan disebut sebagai hak utama pada akhir pengabdian. Dengan demikian, pemberitaan membangun penilaian bahwa pemenuhan hak veteran merupakan bentuk penghargaan yang seharusnya diberikan negara.

Rekomendasi Penyelesaian

Waspada menekankan agar hasil rapat tidak berhenti sebagai forum pertemuan, tetapi diwujudkan menjadi program kerja nyata.

Frame Waspada dapat dirumuskan:

pelayanan belum optimal → persoalan pendaftaran → veteran berjasa dan berhak sejahtera → sinergi dan program nyata.

Perbandingan Framing Ketiga Media

Berdasarkan penjelasan sub bab sebelumnya, ketiga media memiliki frame makro yang sama, yaitu bahwa terdapat persoalan pemenuhan hak veteran yang membutuhkan intervensi negara. Namun, frame mikro masing-masing media berbeda.

1. Media Posmetro Medan menggunakan pendekatan *problem-oriented*, dengan menonjolkan veteran yang belum memperoleh hak.
Pendekatan ini memperlihatkan kesenjangan antara jasa dan hak veteran serta kebutuhan pemerintah menghadirkan perlindungan yang lebih nyata dan secara inklusif.
2. Media Tobasatu menggunakan pendekatan *administrative-oriented*, dengan menjadikan birokrasi dan data sebagai pusat persoalan.
Pendekatan tersebut menunjukkan pentingnya pembenahan administrasi, validitas data, serta penyederhanaan prosedur agar pemenuhan hak veteran lebih efektif dan secara inklusif.
3. Media Waspada menggunakan pendekatan *institutional-synergy-oriented*, dengan menekankan koordinasi antarlembaga dan tindak lanjut konkret.
Pendekatan ini menegaskan bahwa sinergi kelembagaan harus menghasilkan keputusan terkoordinasi, program nyata, dan pemenuhan hak veteran berkelanjutan serta secara inklusif.

Konstruksi Tanggung Jawab Negara

Temuan penting penelitian ini adalah bahwa ketiga media tidak mengonstruksi tanggung jawab negara semata-mata dalam bentuk pemberian tunjangan.

Tanggung jawab negara dikonstruksi dalam rantai dalam Gambar 1 berikut:



Gambar 1 Temuan Penelitian terkait Konstruksi Tanggung Jawab Negara terhadap Veteran

Sumber : Data diolah (2026)

Rantai tersebut menunjukkan perubahan pemaknaan terhadap veteran. Veteran tidak hanya diposisikan sebagai simbol perjuangan masa lalu, tetapi sebagai subjek hak yang harus dilayani negara pada masa kini (Anwar et al., 2025; Silondae et al., 2025). Posmetro Medan memperlihatkan persoalan pada tahap pemenuhan hak. Tobasatu memperlihatkan persoalan pada tahap data dan administrasi. Waspada memperlihatkan kebutuhan koordinasi agar pelayanan menghasilkan tindakan nyata. Dengan demikian, ketiga media secara tidak langsung membangun konsep akuntabilitas negara berbasis pelayanan.

Data sebagai Persoalan Keadilan bagi Veteran

Temuan lain yang penting adalah munculnya data sebagai unsur yang sangat menentukan pemenuhan hak. Jika veteran belum terdaftar, hak yang secara normatif dimilikinya berpotensi tidak dapat diterima secara administratif. Karena itu, persoalan data bukan sekadar persoalan teknis. Data menjadi fondasi penting bagi ketepatan sasaran, keadilan pelayanan, akuntabilitas kebijakan, serta perlindungan hak veteran secara berkelanjutan.

Data menjadi penghubung antara:

hak secara hukum → pengakuan administratif → akses pelayanan → penerimaan manfaat.

Media Online Tobasatu paling kuat menampilkan persoalan ini dengan menghubungkan pendataan dengan keterlambatan pemenuhan hak. Media Waspada juga menyebut masih banyak calon veteran yang belum mendaftar, sementara Media Posmetro Medan menempatkan perubahan tata kelola administrasi sebagai bagian dari konteks pemberitaan. Dengan perspektif tersebut, sinkronisasi data veteran dapat dipandang sebagai bagian dari keadilan administratif (Alfadhli et al., 2026).

Pergeseran dari Penghormatan Simbolik ke Pemenuhan Substantif

Ketiga media secara bersama-sama membentuk konstruksi bahwa menghormati veteran tidak cukup dilakukan melalui pernyataan penghargaan.

Penghormatan harus diwujudkan melalui:

1. Pendataan veteran yang akurat;
Pendataan akurat memastikan veteran teridentifikasi secara jelas, sehingga hak, bantuan, dan layanan dapat diberikan berdasarkan data yang valid dan mutakhir serta mendukung perencanaan kebijakan yang lebih tepat sasaran..
2. Administrasi yang sederhana;
Administrasi sederhana mengurangi beban birokrasi veteran, mempercepat pengurusan hak, serta mencegah prosedur berbelit yang berpotensi menghambat pelayanan secara efektif dan transparan
3. Pelayanan yang mudah diakses oleh veteran;
Pelayanan mudah diakses menunjukkan kehadiran negara yang responsif, dengan menyediakan mekanisme layanan sederhana, ramah, inklusif, dan menjangkau veteran secara merata termasuk veteran yang memiliki keterbatasan mobilitas dan akses informasi.
4. Koordinasi antarlembaga;
Koordinasi antarlembaga diperlukan agar pemerintah, organisasi veteran, dan instansi terkait memiliki peran jelas dalam memastikan pemenuhan hak veteran secara terpadu dan berkelanjutan serta menghindari tumpang tindih kewenangan dan lemahnya komunikasi antarinstansi terkait.
5. Pemenuhan hak secara tepat sasaran; dan
Pemenuhan hak tepat sasaran memastikan bantuan dan fasilitas diterima veteran sesuai kebutuhan, kondisi, ketentuan, serta prinsip keadilan pelayanan publik yang berorientasi kemanusiaan sehingga manfaat kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah benar-benar dirasakan oleh veteran secara nyata.
6. Tindak lanjut dalam bentuk program nyata.
Tindak lanjut program nyata membuktikan penghormatan melalui tindakan terukur, berkelanjutan, dan dapat dievaluasi, bukan sekadar janji atau seremonial tanpa dampak sehingga penghormatan kepada veteran menghasilkan perubahan nyata bagi kesejahteraan.



Gambar 2 Penghormatan kepada Veteran
Sumber : Data diolah (2026)

Media Online Waspada secara eksplisit menekankan bahwa hasil koordinasi tidak boleh berhenti pada forum pertemuan, tetapi harus diwujudkan melalui program kerja nyata yang terukur, berkelanjutan, responsif terhadap kebutuhan veteran, serta memberikan dampak langsung bagi peningkatan kesejahteraan dan pemenuhan hak mereka. Hal tersebut memperkuat temuan utama penelitian bahwa media mengonstruksi tanggung jawab negara sebagai tanggung jawab yang bersifat substantif, administratif, dan berorientasi hasil (Kaligis et al., 2021).

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis framing Robert N. Entman, Posmetro Medan, Tobasatu, dan Waspada mengonstruksi pemenuhan hak Veteran Republik Indonesia di Sumatera Utara sebagai tanggung jawab negara. Posmetro Medan menyoroti belum diterimanya tunjangan dan dana kehormatan; Tobasatu menekankan hambatan birokrasi dan pendataan; Waspada menyoroti pelayanan serta pendaftaran yang belum optimal. Penyebab utama dipahami berkaitan dengan administrasi, data, pendaftaran, dan koordinasi. Secara moral, ketiga media menempatkan veteran sebagai pejuang bangsa yang layak memperoleh penghormatan dan kesejahteraan. Penyelesaian diarahkan pada sinergi, reformasi administrasi, pendekatan pelayanan, serta koordinasi berkelanjutan. Konstruksi tersebut menunjukkan pergeseran penghormatan veteran dari simbolik menuju substantif melalui pemenuhan hak, dengan data dan administrasi sebagai bagian penting dalam mewujudkan keadilan bagi veteran.

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah perlu memperkuat pendataan, menyederhanakan layanan, dan memastikan koordinasi lintas lembaga menghasilkan pemenuhan hak veteran secara terukur. LVRI perlu memperkuat advokasi, memperbarui data anggota, dan membangun komunikasi intensif dengan pemerintah untuk mempercepat pemenuhan hak veteran. Media massa perlu menyajikan pemberitaan veteran secara akurat, berimbang, kontekstual, serta memverifikasi regulasi agar tidak menyesatkan masyarakat. Penelitian selanjutnya perlu memperluas media, periode pemberitaan, wilayah kajian, serta membandingkan framing media nasional, lokal, dan organisasi veteran.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfadhli, M. A., Sugiarto, H., & Wardono, H. N. (2026). *Negara Kesejahteraan Digital: Data Sosial, Keadilan Kebijakan, dan Masa Depan Layanan Publik*. Goresan Pena.
- Anwar, M. T. S., Silondae, T. T. A., Satyadharma, M., & Suhendra, E. (2025). Hari Veteran Nasional 2025 dalam Bingkai Media Nasional (Analisis Framing Entman). *Jurnal Intelek Insan Cendikia*, 2(8), 15835–15845. <https://doi.org/https://jicnusanantara.com/index.php/jiic/article/view/4888>
- Baka, W. K., Rianse, U., Rajulan, M., Mursalim, S., Silondae, T. T. A., Sjachrawy, L. O. M. I., & Prasetyo, E. W. (2026). *Dari Sejarah Perjuangan Menuju Masa Depan Bangsa*. Luana Publishing House.
- Barmuddin, & Safitri, T. N. (2026). Kontribusi Veteran dalam Penguatan Karakter Generasi Muda dalam Mendukung Pembangunan Nasional (Studi di Provinsi Sulawesi Tenggara). *Jurnal Formasi: Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Kebijakan Pembangunan*, 11(1), 10–23. <https://ojs.brida.sultraprov.go.id/index.php/formasi/article/view/56>
- Barmuddin, Satyadharma, M., & Silondae, T. T. (2026). Framing Media dalam Peringatan HUT LVRI Tahun 2026: Veteran dan Solidaritas Bencana. *JAGADDHITA: Jurnal Kebhinnekaan Dan Wawasan Kebangsaan*, 5(2), 9–17. <https://doi.org/10.30998/rmztnk24>
- Barmuddin, Satyadharma, M., Silondae, T. T. A., & Prasetyo, E. W. (2025). Kajian Literatur Terhadap Penurunan Semangat Nasionalisme Dan Rasa Cinta Budaya Generasi Muda Akibat Globalisasi. *Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran*, 4(2). <https://doi.org/10.70294/juperan.v4i02.1593>
- Basuki, Kosasih, U. S., & Saepudin, A. (2025). Guru sebagai Agen Sosialisator JSN'45. *Jurnal Pemberdayaan Berkelanjutan : Bakti Papsel*, 1(2), 31–40.

- <https://doi.org/10.63185/bakti.v1i2.217>
- Fariansyah, M., Hidayat, D. R., & Basith, A. A. (2020). Konstruksi Makna Aksi Massa 212 Bagi Wartawan Detik.com. *Jurnal Kajian Jurnalisme*, 3(2), 196. <https://doi.org/10.24198/jkj.v3i2.25487>
- Hadiwijaya, A. S. (2023). Sintesa Teori Konstruksi Sosial Realitas dan Konstruksi Sosial Media Massa. *DIALEKTIKA KOMUNIKA: Jurnal Kajian Komunikasi Dan Pembangunan Daerah*, 11(1), 75–89. <https://ejournal.unis.ac.id/index.php/DK/article/view/3498>
- Haerul, Z. A., Nurhakki, N., & Hayat, N. (2024). Framing Penulisan Berita pada Media Online Tuturkata. *Publisistik: Riset Jurnalistik Dan Media Komunikasi*, 1(1), 19–27. <https://doi.org/10.35905/publistikji.v1i1.10581>
- Hidayat, R., & Prasetyo, F. H. (2023). Analisis Framing Robert N Entman Pada Berita Larangan Mudik 2021 di Media Detikcom dan Kompas. Com. *Journal Communication Lens*, 2(2), 1. <https://jurnal.uic.ac.id/Lens/article/view/174>
- Kaligis, R. A. W., Sofiyani, N., & Clara, C. (2021). Implementasi Misi Televisi Republik Indonesia: Antara Tanggung Jawab Sosial dan Kompetisi Media. *Jurnal Kajian Jurnalisme*, 5(1), 64. <https://doi.org/10.24198/jkj.v5i1.31893>
- Kerih, A. S. (2026). Partisipasi Pemuda Panca Marga dalam HUT Ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia: Pewarisan Nilai Juang dan Penguatan Eksistensi Organisasi di Provinsi Nusa Tenggara Timur. *Jurnal Psikososial Dan Pendidikan*, 2(3), 3375–3388. <https://publisherqu.com/index.php/psikosopen/article/view/4911>
- Manalu, M. (2023). *Retorika dalam Media Massa*. Guepedia.
- Mursalim, S., & Sulisty, G. A. (2026). Framing Media dan Pembentukan Opini Publik atas Hilangnya Tumbler Tuku. *Kandole (Kajian Dan Analisis Multidisiplin Layanan Edukasi)*, 2(1), 13–23. <https://journal.baktinusantarasultra.org/kandole/article/view/23>
- Nugroho, A. C., Wati, K., & Anwar, M. T. S. (2026). Penguatan Wawasan Kebangsaan Dalam Meningkatkan Soliditas Pemuda Panca Marga Pada Resimen Ix Yp/Jaya. *Al-Furqan: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya*, 5(3), 1167–1179. <https://publisherqu.com/index.php/Al-Furqan/article/view/4278>
- Peranginangin, I. F. D., Lubis, P. R., & Batubara, M. Q. (2025). Dinamika Media Massa dan Perubahan Sosial di Indonesia. *Komunikologi: Jurnal Pengembangan Ilmu Komunikasi Dan Sosial*, 9(2), 58. <https://doi.org/10.30829/komunikologi.v9i2.26943>
- Pirsouw, M., Setiawan, A. G., Saepudin, A., Satyadharma, M., & Silondae, T. T. A. (2025). Aktualisasi Nilai Juang: Keterlibatan Pemuda Panca Marga dalam Peringatan HUT Tentara Nasional Indonesia (TNI) Tahun 2025 (Suatu Bentuk Eksistensi). *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 1(4), 1387–1396. <https://doi.org/10.63822/hxyx0d53>
- Putera, Z., Saepuddin, A., & Satyadharma, M. (2026). Peran Veteran Dalam Merawat Nasionalisme dan Semangat Kebangsaan. *Nusantara: Journal of Social Sciences & Humanities*, 1(1). <https://journals.edukasinusantara.com/njssh/article/view/31>
- Rifa'i, B. (2024). Realitas Media dan Konstruksi Sosial Media. *Journal of Islamic Social Science and Communication (Jissc) Diksi*, 3(01), 29–42. <http://journal.iaipibandung.ac.id/index.php/diksi/article/view/259>
- Saepudin, A. (2026). Harvetnas 2026 sebagai Ruang Kebersamaan: Mengenang Perjuangan Veteran melalui Tabur Bunga di TMP Panca Wati Kabupaten Karawang. *Jurnal Psikososial Dan Pendidikan*, 2(3), 3418. <https://publisherqu.com/index.php/psikosopen/article/view/4922>
- Satyadharma, M., & Erfain. (2022). Peran Veteran dalam Meningkatkan Semangat Nasionalisme Pada Masyarakat: Studi pada DPD LVRI Sulawesi Tenggara. *Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 2(2), 117–127. <https://doi.org/10.57250/ajsh.v2i2.85>
- Savitri, E. (2024, August 19). Mengenal Veteran RI, Pengabdian dan Penghormatan. *Kementerian*

- Pertahanan Republik Indonesia*. <https://www.kemhan.go.id/pothan/2024/08/19/mengenal-veteran-ri-pengabdian-dan-penghormatan.html>
- Silalahi, P. (2026). Sumut Punya 2240 Veteran, Ada Calon Yang Belum Terima Tunjangan Dana Kehormatan atau Hak Lainnya. *Pos Metro Medan*. <https://amp.posmetromedan.id/sumut/14003/sumut-punya-2240-veteran-ada-calon-yang-belum-terima-tunjangan-dana-kehormatan-atau-hak-lainnya/>
- Silondae, T. T. A., Safitri, T. N., Hasmawati, & Putra, Z. (2026). Konstruksi Nilai Perjuangan Veteran Dan Nasionalisme Generasi Muda Dalam Pemberitaan Hari Veteran Nasional 2026 Dengan Analisis Framing Di Media Online Sulawesi Tenggara. *Jurnal Psikososial Dan Pendidikan*, 2(3), 3360–3374. <https://publisherqu.com/index.php/psikosopen/article/view/4910>
- Silondae, T. T. A., Satyadharma, M., & Safitri, T. N. (2025). Veteran RI Sebagai Sumber Belajar Sejarah (Suatu Sumbangsih Pemikiran Bagi Dunia Pendidikan). *Kandole (Kajian Dan Analisis Multidisplin Layanan Edukasi)*, 1(2). <https://journal.baktinusantarasultra.org/kandole/article/view/13>
- Sukawati, F., & Silondae, T. T. A. (2026). VETERAN ADALAH GURU SEJARAH TERBAIK: Refleksi Hari Kebangkitan Nasional Tahun 2026. *Jurnal Pendidikan Sosial Dan Humaniora*, 5(3), 3081–3097. <https://publisherqu.com/index.php/pediaqu/article/view/4395>
- Tahitu, A., Tutuhaturnewa, A. R., & Sirait, J. P. M. (2021). Konstruksi Realitas Sosial dalam Jurnalisme Investigasi: Analisis Naratif Laporan Mendalam Tempo. *Jurnal Badati*, 3(2), 142–159. <https://doi.org/10.38012/jb.v3i2.1391>
- tobasatu.com. (2026, September 10). Pemenuhan Hak Veteran RI, Kemhan dan Pemda Sinkronkan Data 2.240 Pejuang di Sumut. *Tobasatu*. <https://www.tobasatu.com/2026/09/10/pemenuhan-hak-veteran-ri-kemhan-dan-pemda-sinkronkan-data-2-240-pejuang-di-sumut/>
- waspada.id. (2026). Kepala Bacadnas Kemenhan Buka Rakor Antar K/L Bahas Hak-Hak Veteran RI di Kota Medan. *Waspada*. <https://www.waspada.id/berita/kepala-bacadnas-kemenhan-buka-rakor-antar-k-l-bahas-hak-hak-veteran-ri-di-kota-medan>